



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SITI AISYAH
NIK : 3578224502700003
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 2 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI AISYAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 80907

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/120 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MOBIL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
3. LAINNYA, SHARP, LG, PHILIPS AC, KULKAS, MESIN CUCI DAN
TV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.443.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.443.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-
24462/CT/KPP.1107/2026**

Tanggal : 19 Februari 2026

NPWP : 3578224502700003

Nama Wajib Pajak : SITI AISYAH, **S.AG**

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak: 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima SPT : 19 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh
Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan
Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan
basah.



Membalas



99+

